

## **Konsepsi Peran Laki-laki dan Perempuan**

**Ahmadiyah Manislor**

**Oleh: Rosidin**

### **A. Pendahuluan**

Perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan masih memunculkan pertanyaan, apakah perbedaan itu, Ahmadiyah telah menempatkan kaum laki-laki berperan pada permasalahan publik sementara perempuan lebih banyak berada diwilayah domestik sebagai ibu rumah tangga atau pekerjaan-pekerjaan rumah. Dan pembagian peran ini pada struktur masyarakat Ahmadiyah berdasarkan kesepakatan bersama atau tidak. Dan apakah pembagian peran ini disadari atas kerelaan oleh perempuan sendiri.

Masyarakat cenderung beranggapan bahwa perbedaan atau pembagian kerja secara seksual adalah sesuatu yang alamiah. Stereotipe yang dianggap kodrat yang melahirkan ketidakadilan gender bagi perempuan dan laki-laki. Akibatnya, lahir pembagian kerja secara seksual. Laki-laki mendapat porsi yang lebih menguntungkan daripada perempuan. Mansur Fakih mengatakan bahwa hakikat pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan adalah setara.<sup>55</sup> Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan tidak seharusnya didasarkan atas jenis kelamin/sek. Laki-laki bisa mengasuh anak, mencuci dan memasak sedangkan perempuan bisa bekerja diluar rumah. Konstruksi kerja keduanya didasarkan atas konstruk budaya yang berlaku dimasyarakat. Anggapan yang keliru yang selama ini menjadi paradigma masyarakat adalah laki-laki memiliki kewenangan pada pekerjaan publik, sedangkan perempuan berada dalam pada ranah domestik. Dengan begitu ketika membicarakan persoalan

---

<sup>55</sup> Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, social, budaya dan lain-lain. Selama ini, perempuan memiliki akses yang secara sistematis rendah terhadap berbagai sumberdaya produktif, termasuk sumberdaya pendidikan, tanah, informasi dan keuangan. Ketidaksetaraan gender dalam akses kontrol atas modal (*asset*) produktif seperti tanah, informasi, teknologi dan modal keuangan membatasi perempuan untuk berperan serta dan memanfaatkan peluang yang diberikan oleh pembangunan. Lihat Nasaruddin Umar, *Persepektif Islam Dalam Al-Qur'an*, (Disertasi Program Pascasarjana IAIN Syarif hidayatullah, Jakarta, 1999) hlm 40

relasi kerja laki laki dan perempuan ia menegaskan hal itu bukan kodrat Tuhan tetapi konstruksi budaya.<sup>56</sup>

Terbentuknya perbedaan peranan antara perempuan dan laki-laki, dimana wilayah perempuan di dalam rumah dan laki-laki di luar rumah dapat dilihat dari berbagai perspektif. *Pertama*, konstruksi sosial yang menerangkan bagaimana proses awal bidang domestik dan bidang publik itu terbentuk yang meliputi; a). Proses eksternalisasi yaitu suatu nilai yang diproduksi oleh individu dari yang tidak ada menjadi ada. b). Proses objektivikasi, yaitu kesepakatan-kesepakatan yang ada menjadi realitas sosial atau proses penolakan dan proses penerimaan sehingga realitas terbentuk. c). Proses Internalisasi yaitu dari individu itu sendiri karena sebenarnya individu merupakan bagian dari masyarakat sosial. *Kedua*, reproduksi sosial yaitu bagaimana sebenarnya perbedaan bidang domestik dan publik itu dikuatkan. Hal ini dilakukan melalui a). dengan menggunakan simbol-simbol seperti dibentuknya 'Dharma Wanita' yang sebenarnya lebih menguatkan posisi perempuan di bidang domestik dan laki-laki di bidang publik, b). reproduksi status biologis perempuan misalnya perempuan adalah makhluk yang lemah, perempuan berkaitan dengan kesehatan, melahirkan, perempuan yang sedang menstruasi lebih emosional sehingga dapat merugikan perempuan dalam dunia kerja. c). reproduksi status kultural perempuan misalnya perempuan lebih telaten dan rapi sehingga perempuan diberikan pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian yang tinggi.<sup>57</sup>

Disini terlihat kesetaraan gender belum muncul secara optimal, ditambah lagi dengan *budaya patriarki* yang terus langgeng membuat perempuan berada di dalam kelompok yang ter subordinasi menjadi rentan terhadap kekerasan. Di sini laki-laki dalam posisi dominan atau superior dibandingkan dengan perempuan. Anggapan isteri milik suami dan seorang suami memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada anggota keluarga yang lain, menjadikan laki-laki berpeluang melakukan kekerasan.

Analisis gender atau perspektif gender mengakui adanya perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki. Karena itu, perempuan berpotensi untuk menstruasi, hamil dan menyusui dengan ASI. Sementara laki-laki tidak memiliki potensi

---

<sup>56</sup> Lihat Mansur Faqih, *Analisis gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 27

<sup>57</sup> Berkaitan dengan aspek pola dominasi pada masyarakat lihat, Anthony Giddens, *Kapitalisme dan teori Sosial Modern; Suatu Analisis Karya Tulis Marx, Durkheim dan Max Weber*, (Jakarta, UI Press, 1985) hlm 192-197

reproduksi ini. Perbedaan ini bisa berlanjut pada perbedaan-perbedaan psikologis, kebutuhan dan keinginan. Bahkan dari satu jenis kelamin saja, bisa jadi ada perbedaan-perbedaan karakter, kebutuhan dan keinginan antara satu individu dengan individu yang lain. Yang ditekankan dari perspektif gender, bahwa perbedaan biologis tidak bisa dijadikan alasan bagi adanya pembedaan atau diskriminasi mengenai hak sosial, budaya, hukum dan politik. Begitu juga perbedaan gender dan peran-peran gender tidak boleh dijadikan dasar perlakuan yang tidak adil terhadap salah satu jenis kelamin. Baik berupa stereotipe, beban ganda, subordinasi, marjinalisasi, kekerasan maupun bentuk-bentuk ketidakadilan yang lain.

Perspektif gender menuntut adanya perlakuan yang adil terhadap kedua jenis kelamin, perempuan dan laki-laki. Perempuan menjadi subyek pertama dari proyek keadilan gender. Semua tatanan sosial, budaya, hukum dan kebijakan politik harus dirumuskan ulang untuk memenuhi tuntutan perspektif gender, yaitu keadilan relasi laki-laki dan perempuan. Dengan memastikan tidak ada satu jenis kelamin menjadi obyek ketidakadilan dari jenis kelamin yang lain. Keadilan relasi gender bertujuan untuk dan menjadi salah satu dari agenda besar peradaban kemanusiaan, yaitu keadilan sosial. Keadilan adalah gagasan dasar dan tujuan utama dari semua jenis peradaban kemanusiaan di dunia ini. Keadilan juga menjadi misi utama (*al-maqâshid al-‘âliyah*) yang diajarkan setiap agama sebagai dasar pencapaian cita-cita kesejahteraan kemanusiaan di muka bumi ini. Sebagaimana Faqihuddin yang mengutip tulisan KH Husein Muhammad dalam kompas 12/11/2007, bahwa Abu Bakr al-Razi (w. 865 M), pemikir besar Islam jauh-jauh telah menegaskan: “Tujuan tertinggi kita diciptakan dan kemana kita diarahkan bukanlah kegembiraan atas kesenangan fisik, tetapi pencapaian ilmu pengetahuan dan praktik keadilan”. Jauh sebelumnya, filosof klasik Aristoteles mengemukakan: “Keadilan adalah kebajikan tertinggi yang di dalamnya setiap kebajikan dimengerti”.<sup>58</sup>

## **B. Konsepsi Peran Laki-laki dan Perempuan**

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara biologis sudah terjadi sejak

---

<sup>58</sup> Faqihuddin Abdulkodir. Ummu Azizah, Referensi bagi Hakim Agama, Jakarta, Komnas Perempuan, 2008, hlm. 24.

masa konsepsi, masa perkembangan embriologis dan masa akil baligh<sup>59</sup>. Secara sosiokultural perbedaan tersebut dikembangkan sesuai dengan kondisi yang berlangsung di kalangan bangsa yang bersangkutan. Hanya saja, dalam kenyataan historis ternyata di hampir semua etnis bangsa-bangsa di dunia, seringkali perbedaan biologis itu diterjemahkan terlalu jauh dalam peran gender.

Dalam setiap pembicaraan mengenai peran seorang perempuan maupun laki-laki, terungkap kata 'kodrat'. Perempuan dianggap memiliki kodrat yang berbeda dari kodrat laki-laki. Misalnya, banyak orang menyatakan bahwa pada perempuan melekat kodrat untuk laki-laki, dicari, diperhatikan dan dicintai. Sementara pada laki-laki, melekat kodrat untuk mengejar, mencari, memperhatikan dan mencintai. Sehingga ketika ada laki-laki yang mengejar-ngejar perempuan, dianggap wajar, sementara kalau perempuan mengejar laki-laki, dianggap tidak wajar karena menyalahi kodratnya sebagai perempuan<sup>60</sup>. Kita juga sering mendengar ungkapan bahwa di antara kodrat perempuan adalah hamil, melahirkan, menyusui dan memelihara anak. Jika ada perempuan yang enggan untuk hamil atau menyusui, ia akan dianggap orang yang mengingkari kodrat penciptaannya.

Jika kita mau menelusuri ungkapan-ungkapan ini dengan lebih jernih, banyak hal yang masih perlu diluruskan. Dalam hal bahasa saja, ungkapan 'kodrat perempuan' untuk peran-peran seperti di atas, tidak sepenuhnya tepat. Karena kata 'kodrat' berasal dari bahasa Arab yang berarti kekuasaan dan kemampuan. Ketika 'dicintai dan dikejar' merupakan 'kekuasaan perempuan', kita tidak tepat menyatakan bahwa perempuan yang mengejar dan tidak dikejar adalah perempuan yang menyalahi kekuasaannya. Atau perempuan yang tidak hamil atau tidak mau hamil, dianggap perempuan yang tidak kuat dan menyalahi kemampuannya.

'Kodrat Perempuan' dalam kamus sosial masyarakat Indonesia, lebih merupakan istilah bagi norma-norma yang semestinya melekat pada diri perempuan. Bukan murni dari penciptaan yang selalu melekat pada diri perempuan juga berbeda-beda dari satu suku kesuku yang lain, bahkan dari satu keluarga dengan keluarga yang lain juga berbeda-beda, misalnya persepsi masyarakat tentang perempuan atau isteri yang bekerja, berbeda antara masyarakat perkotaan dengan masyarakat pedesaan,

---

<sup>59</sup> Muhammad Tohir, "Tinjauan Biomedis Terhadap Problema Gender", dalam buku *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Jakarta: Risalah Gusti, 2006, hal. 94

<sup>60</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, "Bangga Menjadi Perempuan perbincangan kodrat dari sisi Islam" makalah tahun 2004, tidak dipublikasikan, hlm. 1

padahal semuanya, biasanya diungkapkan dengan pernyataan ‘kodrat perempuan’.

Kemudian istilah kodrat lebih banyak digunakan untuk mengucilkan perempuan dalam masyarakat, membatasi, mengekang, bahkan melecehka mereka. Misalnya ungkapan bahwa kodrat perempuan adalah menjadi ibu rumah tangga, sering digunakan sebagian orang untuk mengekang perempuan agar tinggal dirumah saja dan tidak banyak keluar rumah sekalipun untuk belajar atau bekerja. Ketika bekerjapun dianggap ‘sambilan’ dan tidak utuh. Persepsi kodrat seperti ini, yang menyebabkan perempuan pembantu rumah tangga misalnya, digaji sangat kecil sekalipun jenis pekerjaannya cukup melelahkan dan melebihi batas kewajaran. Jika dibandingkan, pasti upah pembantu rumah tangga lebih kecil dari gaji sopir yang hanya melakukan pekerjaan antar jemput.

Perbedaan peran, tugas, fungsi, dan tanggung-jawab serta kesempatan antara laki-laki dan perempuan karena dibentuk oleh tata nilai sosial budaya (konstruksi sosial) yang dapat diubah dan berubah sesuai kebutuhan atau perubahan zaman (menurut waktu dan ruang). Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung-jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Gender adalah pembagian peran dan tanggung jawab keluarga dan masyarakat, sebagai hasil konstruksi sosial yang dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntutan perubahan zaman.<sup>61</sup> Gender bukanlah kodrat dan ketentuan Tuhan. Oleh karena itu gender berkaitan dengan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur oleh ketentuan sosial dan budaya di tempat mereka berada. Dengan kata lain, gender adalah pembedaan peran dan tanggung-jawab antar perempuan dan laki-laki sebagai hasil konstruksi sosial budaya masyarakat.

### **C. Kerangka Peran laki-laki dan Perempuan Ahmadiyah**

Sebelumnya penulis perlu menyampaikan dalam penelitian ini adalah soal akses, peran dan kontrol. Terkait dengan akses, peran dan kontrol, Suyatno mengilustrasikan *pertama*, soal akses, yakni peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu. *Kedua* peran, yaitu

---

<sup>61</sup> Setda Kota Medan, *Buku Saku Pemberdayaan Perempuan*, Medan: Pemda Medan, 2000, hal. 1.

keikutsertaan atau partisipasi seseorang/kelompok dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan. *Ketiga* kontrol yaitu penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan<sup>62</sup>. Kenapa tiga hal ini menjadi tolak ukur dalam melihat laki-laki dan perempuan, karena tiga hal ini yang memunculkan istilah domestikasi dan publik di dalam menggambarkan peran gender laki-laki dan perempuan.

Latar belakang munculnya wilayah domestik dan publik ditengarai bersumber dari pembagian kerja yang didasarkan pada jenis kelamin yang secara populer dikenal dengan istilah gender. Pembagian kerja gender tradisional (*gender base division of labour*) menempatkan pembagian kerja, perempuan di rumah (sektor domestik) dan laki-laki bekerja di luar rumah (sektor publik). Pembagian kerja yang demikian ini dianggap baku oleh sebagian masyarakat dan diperkuat oleh Undang-Undang Perkawinan.

Pembagian kerja seperti ini oleh kaum feminis sering disebut dengan istilah pembagian kerja seksual, yaitu suatu proses kerja yang diatur secara hirarkhis, yang menciptakan kategori-kategori pekerjaan subordinat yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin dan stereotipe jenis kelamin tertentu. Pembagian kerja seksual ini telah melahirkan kerja-kerja khas perempuan yang secara hirarkhis menempati tempat subordinat, sehingga karena itu ia dihargai lebih rendah. Kerja-kerja khas untuk tiap jenis kelamin umumnya dikaitkan dengan peran seksualnya, sehingga dikenal istilah kerja produktif untuk laki-laki dan kerja reproduktif untuk perempuan<sup>63</sup>.

Kerja produktif adalah suatu proses kerja yang menghasilkan sesuatu. Dalam masyarakat kapitalis biasanya sesuatu yang dihasilkan itu diartikan dengan nilai tukar. Dalam diskusi gender, konsep kerja produktif ini seringkali diasosiasikan sebagai pekerjaan publik (sektor umum). Oleh karena itu, kerjakerja domestik yang dilakukan perempuan, misalnya memasak -- yang juga menghasilkan sesuatu untuk dikonsumsi keluarga -- seringkali dianggap bukan sebagai kerja produksi.

Sedangkan yang dimaksud dengan kerja reproduktif sebenarnya bisa dilihat dari berbagai segi. Konsep kerja reproduksi memiliki tingkat abstraksi teoritis yang berbeda-beda: reproduksi sosial, reproduksi biologis dan reproduksi tenaga kerja.

---

<sup>62</sup> Suyatno, Ir. Mkes Analisis Gender, slide FKM UNDIP Semarang, 2009. tidak diterbitkan

<sup>63</sup> Rustiani, F., "Istilah-Istilah Umum dalam Wacana Gender", dalam *Jurnal Analisis Sosial: Analisis Gender dalam Memahami Persoalan Perempuan*, Edisi 4/November 1996, Yayasan Akatiga, Bandung, 1996, Hal. 59-60.

Reproduksi sosial berkaitan dengan upaya-upaya mempertahankan suatu sistem sosial. Dalam hal ini, pokok dasarnya adalah merinci struktur apa saja yang harus direproduksi agar reproduksi sosial dapat berlangsung secara utuh.

Reproduksi biologis artinya perkembangan fisik umat manusia atau pengembangbiakan umat manusia. Sementara yang dimaksud dengan reproduksi tenaga kerja adalah perawatan sehari-hari pekerja dan calon tenaga kerja, dan alokasi pelaku-pelaku dalam berbagai posisi di dalam proses pekerjaan. Reproduksi tenaga kerja komponen dasarnya berasal dari reproduksi biologis.

Kedua konsep reproduksi yang disebut terakhir sering diasosiasikan dengan pekerjaan domestik atau kerumahtanggaan<sup>64</sup>. Pembakuan peran seperti ini menyimpan sejumlah kerugian bagi perempuan bahkan bagi peradaban manusia. Pertama, keseimbangan kehidupan akan terganggu bila terjadi kondisi-kondisi darurat yang menyebabkan pembagian peran tersebut tidak dapat berjalan normal. Kedua, peradaban manusia akan berjalan mundur dan bahkan bisa menuju kehancuran.

Kemudian untuk melihat kerangka relasi antara laki dan perempuan Ahmadiyah yang terekpresikan dengan pembagian peran secara 'natural', penulis menggunakan kerangka analisis gender Harvard. kerangka Harvard lebih *concern* dengan membuat pembagian kerja gender (division of labour), peran dalam pengambilan keputusan, tingkat control atas sumberdaya yang kelihatan.<sup>65</sup> Sebagai konsep dan alat, ini digunakan untuk membuka implikasi yang didasari kesadaran terhadap gender. Ini diperlukan untuk melihat yang bolong (gaps) pada level beban kerja, pengambilan keputusan dan sebagainya, antara perempuan dan laki-laki yang terjadi di komunitas Ahmadiyah Manislor.

Parameter lainnya yang juga dilihat adalah gender dan dominasi umur: indentifikasi yang lebih jelas soal perempuan dewasa, laki-laki dewasa, anak-anak, dan/atau orang tua yang melakukan aktifitas tertentu. Alokasi waktu dihitung prosentasi alokasi waktu untuk tiap aktifitas dan apakah dilakukan secara harian atau kadang-kadang? Lokus aktifitas yang dilihat adalah di mana suatu kegiatan dilakukan supaya bisa melihat peta mobilitas warga ahmadiyah.

---

<sup>65</sup> Jonatan A. Lassa, Kerangka Analisis Perencanaan Gender (Gender Planning Frameworks), 2006, tidak dipublikasikan.

<sup>64</sup> Ibid, hal. 58

Jema'ah Ahmadiyah Manislor berpegang pada agama Islam yang taat beragama. Sehingga semua itu tercermin dalam berbagai aspek kehidupan; baik dalam perilaku, sistem sosial, sistem ekonomi, kesenian tradisional dan lain-lain. Sistem masyarakat Ahmadiyah termasuk sangat patriarkhi. Masyarakat patriarkhi adalah masyarakat yang mempunyai rujukan sistem yang berdasarkan pada kesepakatan laki-laki, dimana dalam masyarakat tersebut kondisi perempuan sangat termarginalisasikan dan dipinggirkan melalui kerja-kerja domestik. Peminggiran perempuan dalam masyarakat patriarkhi dilihat dari sisi pola pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan terwujud dengan sangat jelas, dimana laki-laki lebih banyak mendominasi sektor publik, sedangkan perempuan pada sektor domestik. Dalam masyarakat patriarkhi, hubungan pembagian kerja tidak menampilkan pola keseimbangan. Dalam pekerjaan, laki-laki lebih dihargai dibandingkan pekerjaan perempuan.

Pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan sangat sedikit mendapatkan penghargaan. Hal ini diakibatkan oleh konstruksi sosial berdasarkan tubuh perempuan dan laki-laki.

Pembagian yang tidak seimbang ini banyak dirasakan oleh kaum perempuan hingga melahirkan beban kerja. Dengan demikian, kondisi kaum perempuan banyak diintimidasi oleh sistem patriarkhi, sedangkan kaum laki-laki lebih banyak menguasai kerja-kerja disektor publik. Kesepakatan yang dibuat laki-laki akan melahirkan budaya patriarkhi. Budaya patriarkhi ini akan tetap hidup dan terpelihara dengan baik dalam kehidupan masyarakat yang bias gender.

Dengan kondisi seperti ini, maka akan muncul suatu aturan yang menegaskan bahwa perempuan diposisikan sebagai penjaga harta keluarga bahkan suami atau perawat dan pemelihara anak-anak dalam konsep pemikiran laki-laki, sehingga perempuan sering disebut dengan makhluk hidup yang menempati kelas dua. Dengan kondisi seperti ini, posisi dan status perempuan semakin terpojokkan dan termarginalisasikan dari kehidupan yang seharusnya dibangun bersama.

Selain posisi yang terpinggirkan, posisi 'kelas dua' yang diberikan oleh budaya patriarkhi kepada kaum perempuan juga sangat mempengaruhi kinerja dan keberadaan kaum perempuan sebagai manusia yang berinteraksi dalam masyarakat patriarkhi. Dengan demikian, pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan menjadi tidak memadai atau berkualitas. Munculnya anggapan bahwa pekerjaan perempuan tidak berkualitas

disebabkan oleh nilai-nilai dalam masyarakat patriarkhi yang menganggap kaum perempuan tidak bisa bekerja.

Kaum perempuan hanya bisa menerima dan menikmati hasil dari pekerjaan yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Hal ini dikarenakan Seperti yang terjadi oleh budaya patriarkhi yang memposisikan kaum laki-laki sebagai pemimpin dan pencari nafkah bagi perempuan. Dengan demikian, posisi perempuan hanya dianggap sebagai pembantu atau perawat yang melakukan pekerjaan sebatas melayani kepentingan laki-laki. Munculnya anggapan yang menyudutkan pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) bentuk fisik laki-laki dan fisik perempuan, dimana fisik perempuan dikatakan tidak sekuat tubuh laki-laki yang dimitoskan tidak kuat dalam bekerja; (2) perempuan adalah makhluk yang berperasaan halus, lemah-lembut, suka merapikan, dan melakukan pekerjaan yang sifatnya menata.

Mansour Fakih dalam analisis gender menyatakan bahwa persoalan mendasar dari perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan adalah lahirnya ketimpangan relasi dan ketidak-adilan. Selain itu pandangan di masyarakat yang menganggap bahwa laki laki itu kuat dan perempuan lemah, semakin menyuburkan kekerasan yang terjadi di masyarakat. Padahal dalam kenyataannya, bisa saja laki laki lemah dan perempuan lebih kuat dari laki-laki.

Faktor-faktor tersebut mengakar dengan sangat kuat, sehingga perempuan selalu diberikan pekerjaan yang ringan atau yang bersifat pekerjaan melayani dan merawat. Meskipun demikian, pekerjaan melayani dan merawat telah mengekang keberadaan kaum perempuan dalam kurungan domestisasi, sedangkan kaum laki-laki bebas lepas menguasai, merancang, mengisi dunia publik yang lebar dengan beragam warna. Selain itu, pekerjaan melayani dan merawat dalam sektor domestik memunculkan gambaran bahwa pekerjaan yang cocok dilakukan oleh perempuan adalah kasur, sumur, dapur. Dengan adanya gambaran tersebut, akan lahir pembagian kerja yang tidak seimbang dalam konsep kesetaraan gender yang hanya akan menjadi impian masyarakat sensitif gender.

Pembagian kerja yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam sektor domestik dan publik akan melahirkan beban kerja ganda bagi kaum perempuan. Akan tetapi, beban tersebut dianggap sebagai peran pembantu dalam pekerjaan laki-

laki, bukan sebagai perempuan yang mampu bekerja terlepas dari segala mitos tubuh dan isu gender yang bias.

Bahkan Nina Mariana Noor, dalam penelitiannya tentang KDRT menjelaskan bahwa, salah satu faktor dari KDRT sulit sekali dihilangkan dalam kehidupan masyarakat, karena faktor social yang melestarikannya. Dan faktor utama adalah ketimpangan relasi antara laki laki dan perempuan. Peran-peran gender tertentu yang harus diambil oleh laki-laki dan perempuan karena ketimpangan ini menumbuhkan terjadinya KDRT. Faktor kedua adalah ketergantungan isteri sepenuhnya terhadap suami. Isteri berada dalam posisi yang sangat rentan karena tergantung secara ekonomi terhadap suami dan menjadi pelampiasan bagi suami<sup>66</sup>.

Perempuan sebagai salah satu pilar penyangga peradaban jangan dibiarkan berada dalam keadaan bodoh, tertinggal informasi dan terbelenggu dengan urusan rumah tangga semata. Jangan membakukaan peran secara kaku, yang hanya akan menyebabkan keresahan di kalangan perempuan. Dasar penciptaannya sebagai manusia yang memiliki kemerdekaan akal, hati nurani dan sikap, tentu akan bertabrakan dengan realita yang ditemuinya. Menghilangkan lahirnya beban dan konflik psikologis dalam diri perempuan bila bersentuhan dengan lahan publik, misalnya bekerja atau menuntut ilmu dengan kondisi yang kurang normal, padahal ia telah berupaya menjalankan tugas domestiknya dengan baik. Perempuan menjadi ragu-ragu dan setengah-setengah dalam melangkah. Kompromi dalam menentukan pembagian peran agar tidak menimbulkan ketergantungan psikologis yang fatal pada diri perempuan.

Menghilangkan stigma bahwa perempuan cenderung malas dan enggan berbuat di luar tugas yang telah digariskan padanya. Hal ini berbahaya jika terjadi kondisi darurat. Ketergantungan psikologis ini akan membuat perempuan takut dan gamang menghadapi realita kehidupan. Di satu sisi mereka ingin mengaktualisasi diri sebagai jiwa yang merdeka, namun di sisi lain mereka merasa takut dan gamang dalam menghadapi resiko kehidupan yang keras. Memastikan sikap menghargai terhadap aktivitas perempuan di sektor publik dan bukan sebagai tugas sampingan. Ini diharapkan perempuan optimal dalam proses aktualisasi dirinya.

---

<sup>66</sup> Nina Mariani Noor, “Ketika Perempuan Ahmadi Menyoal KDRT Mendengar Suara Perempuan Kelompok Minoritas”, hasil penelitian belum dipublikasikan, 2011, hal. 62.

Ruang publik dan domestik dipisahkan secara diametral. Jika pada akhirnya keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor dipilah-pilah dengan kategori peran ganda maka tidak mustahil hal ini akan melahirkan mentalitas dikotomis. Pemilah-milahan seperti ini akan melahirkan kepribadian terpecah (*split personality*) dan tentu akan menjadi masalah besar<sup>67</sup>. Perempuan seharusnya dibiarkan menjadi dirinya sendiri di mana pun ia berada, tanpa harus terkotakkotak pada ruang publik atau domestik. Pemilahan secara dikotomis justru sangat kontraproduktif terhadap kemandirian perempuan itu sendiri. Perempuan boleh memiliki banyak peran (multi peran) selama ia punya komitmen terhadap kebenaran dan keadilan.

Keterpukukan pada dikotomi semacam ini dapat diatasi bila paradigma yang digunakan diubah dengan cara pandang pada sisi kemanusiaan yang bersifat universal. Salah seorang tokoh feminis, Naomi Wolf, mengatakan bahwa upaya untuk memperbaiki kehidupan perempuan membutuhkan keberanian untuk secara terus-menerus mensosialisasikan gagasan feminis secara rasional dan simpatik. “Menjadi feminis” bagi Wolf harus diartikan “menjadi manusia”, karena feminis adalah sebuah konsep yang mengisahkan harga diri pribadi dan harga diri seluruh kaum perempuan<sup>68</sup>. Laki-laki dan perempuan tidak dilihat semata-mata pada kelaki-lakiannya dan keperempuannya, tetapi dilihat secara umum sebagai manusia. Keduanya merupakan agen keadilan dan kebenaran serta mempunyai peluang yang sama dalam membangun peradaban.

Dalam Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) terdapat badan-badan yang mewadahi anggotanya, yaitu *Lajnah Imaillah* (LI) untuk perempuan Ahmadi berusia lima belas tahun ke atas, *Ansharullah* untuk para pria Ahmadi berusia empat puluh tahun ke atas, *Khudamul Ahmadiyah* bagi para pemuda Ahmadi berusia lima belas sampai empat puluh tahun, *Athfalul Ahmadiyah* untuk anak laki-laki Ahmadi dari umur tujuh tahun sampai dengan lima belas tahun, sedangkan *Nashiratul Ahmadiyah* terdiri atas anak-anak perempuan Ahmadi dari umur tujuh tahun sampai dengan lima belas tahun<sup>69</sup>.

Dari kesempatan yang dibuka oleh Ahmadiyah sebagai organisasi, sebenarnya potensi perempuan Ahmadiyah bergeser peran di wilayah publik sangat dimungkinkan

---

<sup>67</sup> Supartiningsih, “Peran Ganda Perempuan”, dalam *Jurnal Filsafat*, April 2003, Jilid 33, Nomor 1, hal 51

<sup>68</sup> Wolf, N., , *Gegar Gender*, Pustaka Semesta Press, Yogyakarta, 1997, hal x

<sup>69</sup> Anggaran dasar Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

karena Ahmadiyah memberikan kesempatan bagi perempuan berkembang lewat organisasi perempuan yang dimilikinya yaitu *Lajnah Ima illah* dan *Nashiratul Ahmadiyah*.

Laki-laki dan perempuan adalah sebanding, sejajar tapi tidak sama. Laki-laki dan perempuan adalah diri yang satu yang menempati dua raga yang berbeda. Perbedaan ini jika dihayati secara jeli akan bermuara pada pengalaman kerinduan akan keutuhan. Pengalaman kerinduan ini sama proporsinya antara laki-laki dan perempuan. Kerinduan akan keutuhan yang horisontal ini penting dalam kacamata spiritual. Hanya melalui Tuhan, manusia baik laki-laki atau pun perempuan dapat memahami kerinduan akan keutuhan yang lebih besar, yaitu kerinduan transenden. Kerinduan untuk selalu bersama-sama dan selalu utuh dengan Yang Mutlak<sup>70</sup>.

Keyakinan dan upaya untuk merealisasikan bahwa laki-laki dan perempuan adalah satu diri merupakan suatu pembebasan paling radikal yang dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan sebagai seorang manusia. Keyakinan ini dapat membebaskan laki-laki dan perempuan dari penjara raganya yang sementara, dikotomi menjadi kesatuan yang utuh, pasangan manusia. Dari interaksi saling mengutuhkan dan mengimananenkan kembali antar pasangan manusia maka kemampuan bertanggungjawab, kedewasaan bersikap, dan ketenangan akan dapat tercapai<sup>71</sup>.

Bila ini ditarik pada konteks gerakan-gerakan yang peduli kaum perempuan maka akan tampak benang merahnya. Ide dasar gerakan tersebut tentu sangat luhur, yakni untuk memanusikan perempuan. Perempuan adalah juga manusia, sama dengan laki-laki. Keduanya sama-sama dititipi ruh, memiliki potensi untuk cenderung ke arah kebaikan dan sebaliknya, berpotensi untuk mencapai ketinggian ilmu dan sebaliknya, dan berpotensi untuk mencapai kemuliaan tertinggi. Karena itu, dalam konteks memanusikan perempuan, perempuan harus diakui sebagai subjek yang punya kehendak, kebaikan, dan kebijakan dari dalam dirinya sendiri.

Oleh karena yang dibidik di sini adalah sisi kemanusiaannya yang universal, maka titik berangkatnya mau tidak mau harus berangkat dari kodrat kemanusiaan. Segala sesuatu diciptakan Tuhan dengan kodrat. Kodrat diartikan sebagai ukuran-ukuran, sifat-sifat yang ditetapkan Tuhan bagi segala sesuatu. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan sebagai individu dan jenis kelamin tentu memiliki kodrat masing-

---

<sup>70</sup> Risang Ayu, M., *Cahaya Rumah Kita*, Mizan, Bandung, 1999, hal. 25

<sup>71</sup> Ibid, hal. 57

masing. Tetapi dari tabiat kemanusiaan secara umum tidak ada perbedaan. Laki-laki dan perempuan dari sisi kemanusiaan mengemban kewajiban kodrati yang sama, yakni sebagai hamba Tuhan dan khalifah di muka bumi. Dengan bersandar pada asumsi dasar bahwa Tuhan menciptakan sesuatu dengan berpasang-pasangan, maka keberadaan laki-laki dan perempuan dengan segenap potensinya diharapkan dapat berkoeksistensi secara sinergis mewujudkan tugas mulia yang diembannya. Keberadaan laki-laki dan perempuan bukan dipahami sebagai sesuatu yang dipertentangkan (dikotomis) tetapi sebagai hal yang berpasangan. Konsep “paritas” (keberpasangan) diharapkan dapat memberikan alternatif wacana untuk memahami relasi laki-laki dan perempuan.

Perempuan dan laki-laki bukanlah dua makhluk yang berbeda sama sekali, tetapi juga tidak benar-benar sama. Perempuan dan laki-laki adalah diri yang satu meski menempati dua raga yang berbeda. Mereka bukan “lawan jenis” tapi “pasangan jenis”. Mereka dicipta bukan untuk saling menindas dan menguasai tetapi saling mengutuhkan dan mengimananenkan sehingga tercapai kemampuan bertanggungjawab, kedewasaan bersikap dan ketenangan diri.

#### **D. Kesimpulan**

Faktor yang mempengaruhi terjadinya pembedaan peran, pertama berangkat dari pemahaman keagamaan, kedua, faktor pendidikan, ketiga faktor ekonomi, di mana perempuan masih bergantung kepada laki-laki/suami. Akses, kontrol di dalam pembagian peran, memang masih terlihat laki-laki mendominasi. Walaupun beberapa hal perempuan sangat dibutuhkan seperti menjaga harta dan mendidik anak.

Tidak jarang domestik dan publik dipahami hanya sekedar ibarat antara rumah dan dunia. Rumah adalah juga bagian dari dunia. Laki-laki dan perempuan tidak mungkin menemukan makna kehadirannya di dunia sebelum ia menemukan makna kehadirannya di rumah. Rumah dan dunia bukanlah dua nama dari dua jenis ruang. Yang terpenting bagi laki-laki maupun perempuan bukanlah untuk mengetahui di mana ia harus paling banyak menghabiskan waktu dan konsentrasinya. Yang terpenting justru sejauhmana keduanya mempunyai pengabdian yang tinggi bagi rumah dan seisinya dan selanjutnya memperluasm pengabdian itu melampaui batas-batas fisik rumahnya, pengabdian yang mendunia. Keduanya harus memiliki

keterikatan yang tidak dapat diingkari dengan rumahnya di satu pihak dan juga memiliki kesadaran yang menyemesta di lain pihak.

Pemahaman di atas, seolah-olah menegaskan perempuan sebaiknya di rumah atau wilayah domestik dan di wilayah publik menjadi tanggung jawab laki-laki. Namun pada kondisi ini tidak disadari bagi perempuan, merupakan jebakan agar bergantung terhadap laki-laki, terutama persoalan ekonomi, karena akses yang luas lebih di dapat oleh laki-laki.

### Daftar Pustaka

- Abdul Kodir, Faqihuddin, "Bangga Menjadi Perempuan perbincangan kodrat dari sisi Islam" makalah tahun 2004, tidak dipublikasikan.
- Abdulkodir, Faqihuddin dan Ummu Azizah, *Referensi bagi Hakim Agama*, Jakarta, Komnas Perempuan, 2008.
- Faqih, Mansur, *Analisis gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
- Giddens, Anthony, *Kapitalisme dan teori Sosial Modern; Suatu Analisis Karya Tulis Marx, Durkheim dan Max Weber*, (Jakarta, UI Press, 1985).
- Lassa, Jonatan A., *Kerangka Analisis Perencanaan Gender (Gender Planning Frameworks)*, 2006, tidak dipublikasikan.
- Nina Mariani Noor, "Ketika Perempuan Ahmadi Menyoal KDRT Mendengar Suara Perempuan Kelompok Minoritas", hasil penelitian belum dipublikasikan, 2011.
- Risang Ayu, M., *Cahaya Rumah Kita*, Mizan, Bandung, 1999.
- Rustiani, F., "Istilah-Istilah Umum dalam Wacana Gender", dalam *Jurnal Analisis Sosial: Analisis Gender dalam Memahami Persoalan Perempuan*, Edisi 4/November 1996, Yayasan Akatiga, Bandung, 1996.
- Setda Kota Medan, *Buku Saku Pemberdayaan Perempuan*, Medan: Pemda Medan, 2000.
- Suyatno, Ir. Mkes, *Analisis Gender*, slide FKM UNDIP Semarang, 2009. tidak diterbitkan.
- Supartiningsih, "Peran Ganda Perempuan", dalam *Jurnal Filsafat*, April 2003, Jilid 33, Nomor 1.
- Tohir, Muhammad, "Tinjauan Biomedis Terhadap Problema Gender", dalam buku *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Jakarta: Risalah Gusti, 2006.
- Umar, Nasaruddin, *Persepektif Islam Dalam Al-Qur'an*, (Disertasi Program Pascasarjana IAIN Syarif hidayatullah, Jakarta, 1999).
- Wolf, N., , *Gegar Gender*, Pustaka Semesta Press, Yogyakarta, 1997.